

SIKAP INDONESIA DALAM MERESPON KONSEP INDO PASIFIK SERTA RELASINYA DENGAN KONDISI PANDEMI COVID-19

Oleh:

Ahmad Zaky Haidir¹⁾, Panji Suwarno²⁾, Surya Wiranto³⁾

^{1,2,3}Universitas Pertahanan Indonesia,

¹E-mail: ahmad.z.haidir@gmail.com

Abstrak

Keamanan maritim menjadi hal yang urgent bagi Indonesia mengingat area kedaulatannya yang bersentuhan langsung dengan laut serta memiliki hubungan bilateral dengan negara-negara lain khususnya ASEAN dalam berbagai hal, baik diplomasi maupun pertukaran sumber daya. Dalam situasi pandemi Covid-19 tentu keselamatan nasional serta sektor-sektor yang terlibat dalam kemaritiman harus terjaga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk membahas efek Covid-19 terhadap keselamatan masyarakat Indonesia sesuai dengan konsep maritime security, khususnya matriks keamanan maritim oleh Bueger. Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia harus menerapkan protokol-protokol yang perlu dilakukan berkaitan dengan keamanan nasional dan keamanan maritim dari segi ancaman pandemi, dengan menerapkan regulasi di pelabuhan dan penerapan aturan-aturan dalam pelayaran.

Kata Kunci: Indo-Pasifik, Keamanan Maritim, Covid-19

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan banyaknya pulau dan luasnya lautan, hal ini dibuktikan dengan luas perairan Indonesia yang mencapai 5,9 juta Km², 16.056 pulau yang terverifikasi serta 1.448 pulau yang belum terverifikasi dan belum memiliki nama. Sebagai negara kepulauan terbesar menjadikan Indonesia memiliki potensi maritim dalam berbagai bidang tidak hanya sebagai kawasan bioteknologi dan wisata kelautan, perairan laut dalam dan mineral kelautan, tetapi juga industri pelayaran dan pertahanan serta industri maritim dunia. Selain potensi sumber daya alam tersebut, Indonesia juga diuntungkan oleh lokasi teritorial yang strategis secara politik maupun ekonomi. Sebagai negara yang secara langsung bersinggungan dengan laut, maka Indonesia memiliki urgensi untuk menganut peraturan dan hukum laut atau hukum maritim, salah satunya yang tercantum dalam konsep Indo-pasifik yang dicetuskan pertama kali oleh Amerika Serikat. Selain itu, ASEAN pun membuat hukum laut yang tercantum dalam *Indo Pasific Outlook* yang mencakup 4 bidang, yaitu kerjasama maritim, konektivitas, perwujudan *sustainable development goals* dan kerjasama ekonomi.

Dari segi kemaritiman, presiden Joko Widodo mencanangkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, dimana upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan ekonomi berbasis maritim guna terciptanya kesejahteraan. Selain itu, inisiatif ini adalah upaya untuk meningkatkan konektivitas dan keterjangkauan antar pulau di Indonesia, yang pada akhirnya terciptanya pemerataan pembangunan ekonomi dan terciptanya keamanan maritim di Indonesia.

Namun di tengah pandemi Covid-19, Indonesia pun merasakan dampak yang signifikan baik dari segi sosial, ekonomi, dan politik. Dibalik itu, kekisruhan politik antar negara, khususnya di Laut China Selatan tetap berlangsung sehingga menuntut adanya kebijakan tertentu yang tepat dan efisien.

Selain konflik, keselamatan dalam pelayaran juga harus terjamin. Penanganan terhadap Covid-19 telah menjadi prioritas utama bagi negaranegara yang paling terpengaruh akibatnya. Di sisi lain, aktifitas-aktifitas pelayaran terutama yang menunjang perdagangan dunia harus terus berjalan secara aman. Hal ini tentunya memerlukan rekayasa kebijakan dalam menghadapi situasi tersebut. Hal lain yang perlu diperhatikan bahwa para pelaut merupakan bagian dari garda terdepan dalam menghadapi bencana global ini. Bagian masyarakat ini harus mampu menjamin ketersediaan kebutuhan sampai dengan tepat dengan meminimalisir resiko penyebaran di lingkungan sekitarnya.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, dimana penulis mencari sumber-sumber dari berbagai literatur dan menafsirkannya dengan pendekatan keilmuan dan metode deskriptif kualitatif atau naturalistic karena melakukan pada kondisi yang alamiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Maritime Security

Alfred Thayer Mahan melalui bukunya berjudul "The Influence of Sea upon History: 1660-1783" mendeskripsikan sea power sebagai kemampuan negara dalam melindungi kepentingan ekonomi, politik, dan militer di laut. Buku tersebut

merumuskan 6 karakter yang menjadi syarat sebuah negara untuk mengembangkan sea power berdasarkan potensi yang telah ada, yaitu letak geografis, bangun muka bumi, luas wilayah, karakter masyarakat, jumlah penduduk dan karakter pemerintah.

Tokoh lainnya yang berkecimpung dalam topik sea power adalah Geoffrey Till. Istilah *sea power* menurut Geoffrey Till dapat diketahui dari dua aspek yakni *input* dan *ouput*. *Input* pada *sea power* terdiri dari angkatan laut, *coastguard*, industri maritim non-militer serta termasuk kekuatan darat dan laut selama masih memiliki relevansi terhadap kepentingan *sea power*. Sebagai hasil keluaran (*output*) sangat berkaitan erat dengan adanya apa yang diperlukan untuk dapat mengendalikan dan memanfaatkan kelautan, bahkan juga memasukkan kapasitas untuk mempengaruhi tingkah laku pihak lain atau sesuatu yang dikerjakan di wilayah kelautan.

Geoffrey Till menjelaskan bahwa laut memiliki keuntungan baik itu masa perang atau pun damai. Pertama, laut sebagai sumber daya dalam pemenuhan kebutuhan energi dan hewani yang berperan penting bagi sebuah negara. Laut juga memberikan sebuah aksesibilitas pada lalu lintas perdagangan dunia yang merupakan bagian dari globalisasi dan dapat meningkatkan kemakmuran serta meningkatkan perdamaian dan kemakmuran secara global. Ketiga, laut dapat dijadikan sebagai sebuah media informasi serta penyebaran ide yang ditransfer melalui perdagangan. Terakhir ialah laut sebagai sebuah instrumen yang dapat digunakan dalam memenuhi kepentingan nasional.

Sedangkan Bueger menyatakan dalam konsepnya yaitu Maritime security matrix bahwa ada 4 konsep vital yang harus saling berhubungan berkenaan dengan peraturan wilayah kelautan, yaitu sea power, marine safety, the blue economy dan the Human security of coastal populations.

1. Sea power

Sea power atau kekuatan laut berkenaan dengan Angkatan laut dan dimensi maritim dalam peperangan dan ancaman antar negara terhadap pertahanan nasional

2. Marine safety

Marine safety atau keamanan laut berkenaan dengan regulasi lalu lintas dan angkutan kapal laut, keamanan Pelabuhan, keamanan pelaut, ketentuan pencarian dan penyelamatan, dan juga perlindungan terhadap lingkungan laut.

3. Blue economy

Blue economy berkenaan dengan peluang peningkatan ekonomi dari sector maritim seperti peluang tujuan pariwisata dan pemanfaatan sumber daya alam yang berasal dari laut.

4. Human security

Konsep human security berkenaan dengan kondisi kehidupan masyarakat pesisir laut yang

bergantung pada laut, seperti keamanan pangan dan marjinalisasi daerah tempat tinggal mereka.

Dari keempat konsep diatas, sea power dan marine safety merupakan pemahaman yang dianut selama berabad-abad berkenaan dengan ancaman di laut, sementara blue economy dan human security timbul bersamaan dengan urgensi maritime security dan dampaknya terhadap sector-sektor lain seperti masyarakat pesisir pantai dan lingkungan laut.

Konsep Indo Pasifik dan Respon Indonesia

Pada dokumen US National Security Strategy (NSS) yang diterbitkan pada Desember 2017, istilah Indo-Pasific disebutkan 7 kali, sedangkan istilah Asia-Pasific tidak disinggung sama sekali. Pada bulan Juni 2018 Angkatan Laut AS mengubah nama Pasific Command menjadi Indo-Pasific Command. Beberapa ahli berpendapat bahwa perubahan ini tidak hanya sekedar perubahan nama atau istilah, namun mengindikasikan potensi ekstensi visi strategi AS dari Asia-Pasific menjadi Indo-Pasific, dan mungkin termasuk mendeklarasikan kekuatan di LCS.

Meski konsep Indo Pasifik bukan merupakan hal yang baru, namun konsep ini semakin populer setelah presiden AS Donald Trump menawarkan konsep Indo Pasifik melalui pendekatan kebebasan (freedom) dan terbuka (open). Sayangnya pengajuan konsep tersebut diduga ditunggangi kepentingan AS dalam memenangi rivalitas dengan China serta bernuansa militeristik dalam pendekatan utamanya. Meskipun begitu, konsep Indo Pasifik yang dibawa Indonesia mengusung semangat inklusif, yang berarti melibatkan seluruh pihak secara setara, baik AS, China maupun negara lainnya di kawasan tersebut. Selain itu, konsep ini juga mengedepankan prinsip menghargai kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Semangat diplomasi Indo-Pasifik Indonesia patut dihargai sebagai bagian dari dorongan untuk menciptakan stabilitas dan keamanan kawasan. Namun usaha ini perlu dilihat secara komprehensif dan kritis terutama terkait kebutuhan, tujuan dan urgensi. Bobot politis yang sangat besar dalam regionalisme Indo-Pasifik akan mendorong Indonesia masuk dalam dimensi keamanan (security) yang tidak mudah dihadapi selain mekanismenya (vehicles) yang belum tersedia. Disamping itu, Indonesia dan ASEAN sudah mempunyai berbagai mekanisme dan kerja sama yang telah melibatkan negara-negara besar yang lebih berdimensi pembangunan sosial ekonomi (development/trade) terutama melalui berbagai kerja sama dengan mitra wicara, ASEAN Plus dan sebagainya yang sudah dibangun dan terbukti sejauh ini berjalan dengan baik. Indo-Pasifik akan menemukan urgensi dalam politik luar negeri dan diplomasi Indonesia jika Indonesia dapat menemukan apa “kebutuhan paling mendasar” dalam proyek Indo-Pasifik.

Indo Pasific Outlook juga dapat membuka kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan hubungan dengan negara kepulauan di Pasifik pada

tataran yang lebih baik. Letak geografis Indonesia sebagai satu-satunya negara yang berbatasan langsung dengan negara pasifik dapat dimanfaatkan sebagai penghubung bagi ASEAN untuk menuju kawasan pasifik maupun sebaliknya. Penduduk di pasifik yang sangat kental dengan rasa persaudaraan akan membutuhkan Indonesia khususnya Indonesia Timur yang memiliki kesamaan budaya.

Covid-19 dan Dampaknya terhadap Keamanan Maritim

Menurut data statistik UNCTAD, sekitar 80% perdagangan global diangkut melalui pengiriman komersial, yang menggerakkan bahan pangan, energi dan bahan mentah dunia, serta barang-barang dan komponen yang diproduksi. Selain itu, Ini juga termasuk pasokan medis vital, yang sangat dibutuhkan saat ini, dan barang-barang yang diperlukan untuk pelestarian banyak pekerjaan di bidang manufaktur - tanpanya masyarakat modern tidak dapat berfungsi.

Menghadapi pandemi saat ini, pergerakan lintas batas barang-barang bantuan seperti makanan dan pasokan medis akan meningkat secara dramatis. Pembatasan perdagangan dan transportasi lintas batas dapat mengganggu bantuan dan dukungan teknis yang diperlukan. Ini dapat mengganggu bisnis dan memiliki dampak sosial dan ekonomi negatif pada negara-negara yang terkena dampak. Karena itu pemerintah harus terus memfasilitasi pergerakan tidak hanya barang bantuan, tetapi barang secara umum, untuk meminimalkan dampak negatif dari wabah COVID-19.

Di sisi lain, Di tengah wabah saat ini, para pelaut telah mengalami peningkatan pemeriksaan dan pengawasan di berbagai pelabuhan. Banyak negara pelabuhan telah memberlakukan peraturan lokal, pembatasan perjalanan dan karantina, dan membatasi akses gratis ke pelaut. Beberapa operator telah menanggulangi perubahan awak di atas kapal untuk mengurangi interaksi sosial mereka.

Operator pelabuhan juga perlu memahami potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dan ekonomi, jika peran utama mereka dalam transit barang dipengaruhi oleh penyebaran virus. Pekerja pelabuhan menghadapi bahaya tertular COVID-19, dan banyak pelabuhan tidak siap jika banyak pekerja terjangkit Covid-19. Di beberapa pelabuhan terutama di daerah-daerah yang dilanda bencana seperti Eropa barang dalam perjalanan sudah terpengaruh, dan obat-obatan serta peralatan penting mengalami penundaan. Tanpa pelabuhan yang berfungsi, kargo termasuk mereka yang memiliki persediaan yang menyelamatkan jiwa tidak dapat diangkut ke tempat mereka dibutuhkan.

Dengan adanya masalah-masalah tersebut, maka konsep Indo Pasific dan Keamanan maritim harus dibarengi dengan protokol-protokol wajib yang bukan hanya melindungi negara dari ancaman yang nampak seperti konflik antar negara, namun juga dari ancaman pandemi yang mengancam para personil

yang bertugas di laut untuk selanjutnya melindungi keamanan internal Indonesia.

4. KESIMPULAN

Indonesia yang memiliki traffic laut tinggi, tentu membuat urgensi keamanan maritim menjadi tinggi dan krusial. Hal-hal mengenai keselamatan di laut baik yang mengancam kedaulatan negara seperti ancaman dari perbatasan, hingga ancaman lainnya seperti pandemi yang tentu harus dibatasi dan diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan regulasi yang menjaga keamanan nasional. Dengan pertimbangan hubungan diplomasi dalam lingkup Indo Pasific, serta teori-teori keamanan maritim, tentu Indonesia harus merespon dengan sigap adanya pembentukan regulasi dalam hubungan melalui laut, termasuk pelayaran dan pemasokan barang-barang yang melibatkan pelayaran. Hal ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan Bueger dalam matriks keamanan maritim, yaitu Marine Safety dan Human Security.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Chen et al. (2014). *New Perspectives on Indonesia: Understanding Australia's Closest Asian Neighbour*. Perth: Perth USAsia Centre
- Christian Bueger. (2015). What is maritime security?. *Marine Policy*, 53,
- Dr. Marsetio. (2014). *Sea Power Indonesia* Jakarta: Universitas Pertahanan
- He, K., & Li, M. (2020). Understanding the dynamics of the Indo-Pacific: US-China strategic competition, regional actors, and beyond. *International Affairs*, 96(1), 1-7.
- IMO MSC-MEPC.2/Circ.12/Rev.2. Revised Guidelines for Formal Safety Assessment (FSA) for use in the IMO Rule Making Process. International Maritime Organization, London, 9 April 2018.
- Mahan, A.T. 2010. "Discussion of the Elements of Sea Power," in *The Influence of Sea Power Upon History, 1660 - 1783*. Cambridge University Press, 2010
- Muhammad Edrian, (2017). "Melihat Keamanan Maritim Indonesia Dari Ide Poros Maritim," *Jurnal Defendonesia* 2, no. 2
- Rosyada, K., Zulhatta, A. I., & Marsetio, M. (2020). Memajukan Keamanan Maritim pada Sektor keselamatan Laut dalam Menghadapi Penyebaran Covid-19. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(3), 489-501.
- Sinta Herindasari. (2019). Fenomena Indo-Pasifik dan Diplomasi Indonesia. *Jurnal Asia Pasifik Studies*, vol. 3 no. 1
- Tantowi Yahya. "Arti Penting ASEAN Outlook on Indo Pasific bagi Indonesia". Diakses dari <https://kumparan.com/tantowi-yahya/arti-penting-asean-outlook-on-indo-pacific-bagi-indonesia-1sXMNQs9MGy/full> tanggal 29 September 2020 pukul 19.12